



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

DENGAN

DESA LUMUT

NOMOR : 4630/HM.02.04/K.KN-10/11/2024

NOMOR : 140/213/PM/2024

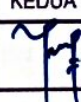
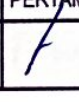
TENTANG

**CIPTA KONDISI, HARMONIS SERTA ANTI POLITISASI SARA dan HOAX
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN SANGGAU**

Pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2024, bertempat di Toba,
dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **SEPTIANA IKA KRISTIA, S. Sos** :Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Sanggau, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
BAWASLU Kabupaten Sanggau yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman No.6, Kelurahan
Beringin, Kecamatan Kapuas, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II.  :Kepala Desa/ Sekdes/ Perwakilan Desa
Lumut, dalam hal ini bertindak dan untuk
atas nama Desa Lumut yang
berkedudukan di Desa Lumut, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA
PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desanya. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah bertugas dalam administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan lain-lain;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini Bertujuan untuk mengadakan kerjasama dibidang Cipta Kondisi, Harmonis Serta Anti Politisasi Sara dan Hoax dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Cipta Kondisi, Harmonis Serta Anti Politisasi Sara dan Hoax yang kemudian disepakati sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi, sesuai tahapan Pemilihan 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan bermartabat;
2. Mengajak semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan 2024;
3. Mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab;
4. Mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan agar berjalan sesuai aturan, berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan bermartabat;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

5. Mengajak semua Pemangku Kepentingan, Paslon, Timses, Parpol, Pendukung/Relawan dan Elit Politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak melakukan perbuatan Politik Uang (*money politik*) dan penyebaran isu SARA serta *Hoax*;
6. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan Pemilihan sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan, namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan;
7. Siap bekerja sama dengan Bawaslu, untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau sara, provokasi dan hoax;
8. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

FORCE MAJURE

- ## Pasal 7

Pasal 8

(.....)